

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar,2019). Salah satu ukuran kondisi social dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al,2021)

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

Pada umumnya kemiskinan menurut (Mulyono, 2017) terjadi karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan dari karakter atau tipologi orang miskin. Ada 4 karakteristik yang dimiliki orang miskin;

1. Memiliki kemauan akan tetapi tidak memiliki kemampuan
2. Memiliki kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan
3. Memiliki kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan dalam arti kata malas
4. Memiliki kemampuan dan kemauan akan tetapi tidak memiliki peluang

Kemiskinan juga merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Kemiskinan sangat berhubungan dengan problem kesejahteraan rakyat dan menjadi taraf minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Sebagian orang memahami kata ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan *evaluative*, serta yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang sudah mapan.

Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tingkat hayati manusia serba kekurangan atau tidak mempunyai harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan ialah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebab mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta kemiskinan satu sama lain saling terkait dimana kemiskinan telah menjadi perhatian primer dalam perkembangan kebijakan sosial.

Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak dasar yang dipahami secara umum antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Listyaningsih, 2018)

Kemiskinan dapat diakibatkan oleh kekurangan sumber daya seperti uang dan barang untuk digunakan memenuhi kebutuhan dasar hidup (Estrada & Wenagama, 2020) kemiskinan adalah masalah pembangunan yang kompleks dan rumit sehingga membentuk sebuah rantai yang saling terkait dan sulit diputuskan. Dikatakan demikian karena kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan, rendahnya pengetahuan dan keahlian, kesulitan mencari pekerjaan, pendapatan untuk konsumsi rendah, gizi buruk, kesehatan buruk, pemukiman kumuh bahkan tidak memiliki tempat tinggal sama sekali dan lain sebagainya.

Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-

sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Sebagaimana yang ditulis di atas, kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik merupakan keadaan dimana seorang individu atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu. Pengukuran tingkat kemiskinan pada setiap negara cenderung berbeda, hal ini dikarenakan standar hidup layak (minimal) dan kondisi sosial ekonomi pada setiap negara juga berbeda.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir disemua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan baik dalam bentuk *top-down* ke model *bottom-up* dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap menyisakan persoalan sepertinya tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan, problema kemiskinan tersebut menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

Masalah kemiskinan terus mendapat perhatian utama, karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah mengalami kesulitan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dikarenakan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan. Oleh sebab itu, pemberantasan persoalan kemiskinan wajib menjadi keutamaan dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, Provinsi Jambi
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Jiwa)**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	16.790	17.000	17.480	18.450	18.200
2	Merangin	33.950	32.380	33.920	35.440	34.140
3	Sarolangun	25.700	25.390	25.790	27.060	26.230
4	Batanghari	27.550	26.530	26.540	27.240	26.240
5	Muaro Jambi	17.380	16.860	17.300	20.490	20.640
6	Tanjab Timur	26.990	25.350	24.230	24.420	23.420
7	Tanjab Barat	36.280	35.120	34.780	36.100	33.950
8	Tebo	22.860	22.830	22.470	23.770	22.810
9	Bungo	21.110	20.870	22.070	23.640	20.690
10	Kota Jambi	50.610	48.950	50.440	54.230	50.400
11	Sungai Penuh	2.480	2.550	2.780	3.030	2.640
`	Provinsi Jambi	281.690	274.320	277.800	293.860	279.370

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi atau keadaan naik turun setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan 0,42 persen yang lumayan banyak terhadap jumlah penduduk miskin, Pada Tahun 2018 Kabupaten Muaro Jambi memiliki penduduk miskin sebanyak 17.380 jiwa dan Pada Tahun 2022 memiliki penduduk sebanyak 20.640 jiwa, dimana mengalami kenaikan sebesar 3.260 jiwa. Sedangkan Kabupaten Tanjab Timur cenderung mengalami penurunan sebesar 1,47 persen dari Tahun 2018 ke Tahun 2022 sebanyak 3.570 jiwa. Penduduk miskin di Kota Jambi pada Tahun 2018 sebanyak 50.610 jiwa, Tahun 2019 penduduk miskin di Kota Jambi menurun 1.660 atau 0,37 persen kemudian kembali naik lagi dan mengalami peningkatan yang tinggi di Tahun 2021 mencapai 54.230 jiwa.

Jumlah penduduk miskin dari setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Jambi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal itu diduga karena pengaruh Covid-19 yang melanda Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan banyak para pekerja yang dipecah dan menjadi pengangguran sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan menjadi naik dengan signifikan.

Berdasarkan penjelasan tentang kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jambi, Berbagai cara dapat ditempuh untuk menuntaskan masalah kemiskinan yakni meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari

kemampuan perekonomian dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu (Astuti & Lestari, 2018). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan nasional (Asrianti, 2017).

Menurut Tambunan, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Ada suatu korelasi menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian juga dengan Hukum Okun's, yang mengatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dengan artian jika pertumbuhan ekonomi naik maka pengangguran akan menurun.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat merupakan konsep pertumbuhan ekonomi. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu-kewaktu diharapkan semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan bagi semua negara (Pujoalwanto, 2014). Dengan demikian dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan sebuah negara dalam meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) dalam jangka panjang untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa yang akan dinikmati dan dikonsumsi oleh penduduk yang berada di negara tersebut.

**Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi
Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	6.069,60	6.326,54	6.570,81	6.844,24	7.125,04
2	Merangin	9.388,24	9.787,46	9.869,18	10.371,68	10.973,80
3	Sarolangun	10.279,95	10.717,75	10.690,79	11.397,73	12.163,61
4	Batanghari	11.147,66	11.713,38	11.667,61	12.221,19	13.728,62
5	Muaro Jambi	15.389,57	16.126,72	16.186,86	16.847,01	18.182,03
6	Tanjab Timur	17.241,20	17.967,59	17.262,51	17.284,93	17.471,91
7	Tanjab Barat	29.279,46	30.744,99	30.559,42	30.976,20	31.866,59
8	Tebo	9.699,61	10.160,98	10.158,89	10.597,49	11.262,58
9	Bungo	12.045,80	12.549,93	12.494,42	13.133,52	13.733,86
10	Kota Jambi	18.667,87	19.550,81	18.775,82	19.515,49	20.529,73
11	Sungai Penuh	4.388,18	4.607,81	4.600,23	4.768,84	4.980,84
	Provinsi Jambi	142.902,00	149.111,09	148.448,82	153.881,69	161.717,68

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi mengalami kenaikan laju pertumbuhan pada periode Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi sebesar Rp142.902,00 Miliar. Bisa kita lihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi dari Tahun 2018 ke Tahun 2022 mengalami laju pertumbuhan yang cukup lumayan naik menjadi Rp161.717,68 Miliar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kabupaten Tanjab Barat di Tahun 2018 memiliki PDRB sebesar Rp29.279,46 Miliar kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2019 sebanyak Rp1.465,53 Miliar dan di Tahun 2022 memiliki PDRB sebesar Rp31.866,59. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah ada di Kota Sungai penuh pada Tahun 2018 memiliki PDRB sebesar Rp4.388,18 di Tahun 2019 mengalami peningkatan tapi di Tahun 2020 mengalami penurunan dan kemudian 2 tahun terakhir selalu Meningkat menjadi Rp4.980,84 Miliar pada Tahun 2022.

Hal yang lebih penting dari pertumbuhan ekonomi adalah mengidentifikasi sumber pertumbuhan baik dalam sisi penawaran atau sektoral maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran pertumbuhan tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral, sedangkan dari sisi permintaan dapat diketahui dari pertumbuhan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah maupun

dari selisih bersih ekspor terhadap impor. Bagi pemerintah daerah bahwa dengan mengetahui sumber pertumbuhan maka dapat diambil kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan atau memperlambat pertumbuhan sektor tertentu sesuai dengan target pembangunan ekonomi yang hendak dicapai.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan adalah pengangguran. Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahterannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Orang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah sejumlah orang atau sejumlah penduduk yang tergolong kedalam angkatan kerja dimana usia produktifnya sudah mencapai 15-64 tahun, baik yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, di golongan kedalam pengangguran.

Tingginya tingkat pengangguran akan berdampak buruk pada kegiatan ekonomi disuatu daerah. Pengangguran juga bisa menyebabkan terhambatnya pembangunan serta tingginya angka kemiskinan dan kriminalitas.

Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual yang dicapai lebih rendah dari atau berada dibawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkatkegiatan ekonomi,pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit.

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2022 (Jiwa)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	4.065	3.595	3.228	3.167	3.677
2	Merangin	7.738	6.719	7.140	9.747	9.533
3	Sarolangun	3.227	5.751	5.752	8.585	7.930
4	Batanghari	4.414	4.943	5.464	5.935	4.560
5	Muaro Jambi	10.276	9.174	10.063	11.184	12.586
6	Tanjab Timur	2.877	2.087	1.853	1.710	1.596
7	Tanjab Barat	4.971	4.256	4.373	3.978	5.095
8	Tebo	3.444	3.575	5.246	5.488	2.557
9	Bungo	8.248	5.399	6.590	10.634	10.688
10	Kota Jambi	15.754	18.917	19.795	31.068	27.158
11	Sungai Penuh	1.802	2.447	1.708	2.494	1.079
	Provinsi Jambi	66.863	71.212	93.990	93.754	86.459

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Dilihat dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa, pada Tahun 2018 jumlah orang menganggur di Kota Jambi sebanyak 15.754 jiwa atau 23,5 persen dari wilayah Provinsi Jambi dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya di Tahun 2019 naik sebesar 2,5 persen atau 18.917 jiwa dan pada Tahun 2022 turun menjadi 27.158 jiwa. Sedangkan jumlah orang menganggur terendah ada di Kota Sungai Penuh sebanyak 1.802 jiwa atau 2,6 persen dari wilayah Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun dan di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.079 jiwa. Jumlah orang menganggur di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan, jika pada tahun 2018 ada 66.863 jiwa yang menganggur, maka pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 93.990 jiwa. Dilihat dari 2 tahun terakhir pada tahun 2020 dan tahun 2021 itu sangat naik drastis dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena Covid-19 yang muncul pada tahun 2020, yang mengakibatkan banyak pekerja atau karyawan yang dipecat atau PHK oleh perusahaan masing-masing yang mengakibatkan banyaknya orang yang menjadi menganggur. Setelah Pandemi Covid-19 berakhir jumlah pengangguran di Provinsi Jambi menurun pada Tahun 2022 menjadi 86.459 jiwa. Hal itu dikarenakan aktivitas seperti biasa sudah kembali normal dan lapangan kerja semakin banyak.

Pengangguran merupakan masalah kependudukan yang berhubungan erat dengan kemiskinan. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya Angkatan kerja baru yang terjadi setiap Tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja

tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan Masyarakat.

Selain pengangguran, faktor lain yang juga mempengaruhi tingginya angka kemiskinan adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di provinsi Jambi dapat meningkat. Mengapa bisa dikatakan demikian, karena jika inflasi terjadi harga barang-barang umum akan meningkat, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Tabel 1.4 Inflasi Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
2	Merangin	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
3	Sarolangun	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
4	Batanghari	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
5	Muaro Jambi	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
6	Tanjab Timur	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
7	Tanjab Barat	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
8	Tebo	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
9	Bungo	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
10	Kota Jambi	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
11	Sungai Penuh	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39
	Provinsi Jambi	3,02	1,27	3,09	1,67	6,39

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Dilihat dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa, Inflasi mengalami fluktuasi atau naik turun tiap tahun. Inflasi yang dipakai disini berdasarkan Inflasi Kota Jambi. Inflasi pada Tahun 2018 mencapai 3,02 persen, di Tahun 2019 turun menjadi 1,27 persen atau mengalami penurunan 1,75 persen di tahun berikutnya naik lagi dan turun lagi. Dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 Inflasi mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun-tahun sebelumnya, di Tahun 2021 Inflasi di Provinsi Jambi hanya mencapai 1,67 persen kemudian di Tahun 2022 mencapai 6,39 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa semakin meningkat.

Inflasi merupakan salah satu keadaan perekonomian disuatu negara dimana terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

dalam waktu yang panjang yang disebabkan oleh ketidakseimbangannya arus barang dan uang. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui Tingkat Inflasi berasal dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dilakukan atas dasar Survey Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS setiap bulan akan memonitor perkembangan harga barang dan jasa di berbagai kota di Indonesia. Selain Indeks Harga Konsumen, indikator Inflasi lain yang digunakan berdasarkan standar *Internasional best practice* ialah (1) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dimana indikator ini melihat transaksi dari penjual/pedagang utama kepada pedagang selanjutnya dalam jumlah besar pada suatu komoditas; (2) Indeks Harga Produsen (IHP) dimana indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang dihasilkan; (3) Deflator Produk Domestik Bruto (DPDB) menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Deflator PDB ini dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan; dan (4) Indeks Harga Aset ini mengukur ada harga aset antara lain property dan saham (Bank Indonesia, 2018).

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan

mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Jika inflasi dapat dikendalikan, dengan baik, maka jumlah masyarakat miskin akan lebih cepat keluar dari garis kemiskinan yang ada.

Selain Inflasi, faktor lain yang juga mempengaruhi tingginya angka kemiskinan adalah Pendidikan. Pendidikan menjadi faktor penting yang bisa membuat seorang keluar dari kemiskinan (Mihai et al,2015) dan memberikan efek waktu yang lama dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, pada level tertentu (Yanti dkk, 2020). Pendidikan tidak saja mempunyai fungsi sebagai sarana satu satunya untuk mendapatkan pekerjaan, dimana diperlukan pula kreativitas juga keterampilan sebagai daya saing dalam menjalani rutinitasnya. Pendidikan juga berperan mengasah kesanggupan dan keterampilan untuk mengatasi problem serta menuntaskan dengan tepat.

Tabel 1.5 Rata-rata lama sekolah Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (dalam tahun)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	8,20	8,21	8,55	8,56	8,57
2	Merangin	7,67	7,68	7,76	7,90	7,91
3	Sarolangun	7,63	7,76	7,87	8,04	8,12
4	Batanghari	7,82	7,85	8,11	8,12	8,21
5	Muaro Jambi	8,09	8,33	8,57	8,58	8,59
6	Tanjab Timur	6,34	6,35	6,70	6,92	7,19
7	Tanjab Barat	7,56	7,70	7,71	8,00	8,18
8	Tebo	7,56	7,57	7,58	7,59	7,70
9	Bungo	8,09	8,15	8,27	8,28	8,29
10	Kota Jambi	10,67	10,91	10,92	11,20	11,21
11	Sungai Penuh	9,84	10,08	10,32	10,33	10,34
	Provinsi Jambi	8,23	8,45	8,55	8,60	8,68

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Dilihat dari tabel 1.5 menunjukkan bahwa, rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi cenderung selalu meningkat. rata-rata lama sekolah di Kota Jambi lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi jambi dapat dilihat dari tahun 2018 ke tahun 2022 yang awalnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Jambi hanya mencapai 10,67 Tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Jambi 10 tahun 8 bulan atau hanya mencapai kelas 1 SMA, di Tahun 2022 mencapai 11,21 tahun artinya rata-rata lama sekolah

penduduk di Kota Jambi 11 tahun 2 bulan atau mencapai kelas 2 SMA. Sedangkan Kabupaten Tanjab Timur sangat buruk dilihat dari Rata-rata lama sekolah di Tahun 2018 hanya mencapai 6,34 tahun atau 6 tahun 4 bulan cuman sampai kelas 6 SD, tapi di Tahun 2022 sudah mencapai 7,19 tahun atau 7 tahun 2 bulan sampai kelas 1 SMP.

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro,1994) Pendidikan di banyak Negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat Pendidikan yang tinggi. Tetapi Pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai Pendidikan hingga ketingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan Universitas. Sehingga tingkat Pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat kaitan pada jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Inflasi dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi.*

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan sudah lama menjadi masalah di berbagai negara, terlebih lagi di negara berkembang, demikian juga halnya dengan Jambi masih ada sekitar 7-8 persen penduduk yang berada dalam garis kemiskinan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemiskinan dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan pada level provinsi, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan pada setiap provinsi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ekonomi tumbuh tetapi tingkat pengangguran, inflasi, pendidikan dan kemiskinan meningkat di Provinsi Jambi.
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis mengapa ekonomi tumbuh tetapi tingkat pengangguran, inflasi, pendidikan dan kemiskinan tetap meningkat di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Secara praktis :

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan informasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi serta lembaga terkait dalam rangka menyusun kebijakan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukan terhadap peneliti lanjutan dalam penerapan konsep kemiskinan yang ada di Provinsi Jambi.